

Laporan Tahunan

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2020

I. Pendahuluan

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi menjadi satu hal wajib yang harus disediakan oleh seluruh badan publik di Indonesia. Setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, informasi yang tersedia setiap saat serta informasi yang diminta masyarakat tetapi diluar informasi yang dikecualikan.

Dalam perkembangannya Badan Publik harus menyiapkan secara matang mengenai informasi apa saja yang masuk ke dalam informasi dikecualikan sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam praktek penyelenggaraan PPID. Keterlibatan dari semua pihak dalam badan publik tersebut sangat penting karena PPID merupakan kewajiban dari semua instansi bukan hanya tanggung jawab dari satu orang yang telah ditunjuk sebagai PPID

II. Maksud dan Tujuan

Maksud dibentuknya PPID di lingkungan BNPB sebagai acuan bagi setiap unit kerja Eselon I dan II serta jajaran dibawahnya dalam penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan informasi publik serta adanya keseragaman informasi yang diberikan kepada publik.

Selain itu dengan ditetapkannya PPID maka dibutuhkan orang yang memiliki kompetensi dan bertanggung jawab penuh dalam pelayanan informasi publik. Sedangkan tujuan dari PPID adalah memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta memberikan informasi yang berada dibawah naungan BNPB secara cepat dan tepat.

III. Pelaksanaan Kegiatan

III.1 Kegiatan PPID BNPB dengan Kemenpan-RB

Mendukung reformasi dan birokrasi dalam pelayanan Komunikasi Publik

Output dari kegiatan ini tim PPID ikut pendampingan dalam pelayanan publik dan memberikan dokumen-dokumen pelayanan komunikasi publik BNPB bertempat di graha BNPB pada Jumat, 5 Juni 2020 dan Senin, 13 Juli 2020.

Link berita:

- a) <https://www.bnpb.go.id/berita/bnpb-optimalkan-reformasi-birokrasi-delapan-area-perubahan>
- b) <https://www.bnpb.go.id/berita/evaluasi-percepatan-dan-pelaksanaan-reformasi-birokrasi-di-lingkungan-bnpb>
 - Melayani pengaduan pelaporan melalui aplikasi lapor-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang terhubung dengan admin BNPB dengan mengidentifikasi jenis pelaporan, kewenangan dan tindak lanjut dari isi pelaporan.

III.2 Kegiatan PPID BNPB dengan Komisi Informasi Pusat (KIP)

Mendukung Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik dan pendampingan pada Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

- 1) Mengikuti sosialisasi dan monitoring Keterbukaan Informasi Publik pada tgl Senin, 13 Juli 2020 (undangan terlampir).
- 2) Melakukan Elektronik Monitoring dan Evaluasi, E-Monev (undangan terlampir) secara online dan mengirimkan ke KIP, 31 Agustus 2020.
- 3) Membuat Video Presentasi Pelayanan Komunikasi Publik BNPB (undangan terlampir) 15 September 2020.
- 4) Pendampingan dan Telaah Video Presentasi Pelayanan Komunikasi Publik BNPB hadir Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dalam penilaian oleh Dewan Juri KIP 16 September 2020.
- 5) Silaturahmi Badan Publik dan Koordinasi se-Indonesia yang akan dibuka presiden RI secara daring pada 26-28 Oktober 2020.

III.3 Kegiatan Rapat PPID BNPB

- 1) Rapat Persiapan Draft SK usulan Tim PPID dan SOP kunjungan Diorama tanggal 8 Januari 2019 di Graha BNPB
- 2) Rapat Pembahasan Mekanisme Pelayanan Informasi PPID BNPB tanggal 25 Februari 2020 di Graha BNPB

- 3) Rapat lanjutan pembahasan SOP kunjungan Diorama dan Evaluasi kunjungan diorama yang telah berjalan tanggal 3 Maret 2020 di Graha BNPB
- 4) Rapat tindak lanjut pemantauan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan Sistem Ruang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N-LAPOR) Tahun 2019 tanggal 11 Maret 2020 di Graha BNPB
- 5) Rapat Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan Rapid tes dalam Mengdiagnosis Infeksi Corona Virus (Covid-19) tanggal 21 April 2020 di Graha BNPB
- 6) Rapat Strategi Komunikasi terhadap Penyebaran Informasi COVID-19 tanggal 03 Juli 2020 di Graha BNPB
- 7) Rapat kerjasama pertukaran informasi public dengan Center For Strategic and International Studies (CSIS) tanggal 10 Juli 2020 di Graha BNPB
- 8) Rapat Evaluasi Pelayanan Komunikasi Publik website PPID tanggal 17 Juli 2020 di Graha BNPB
- 9) Rapat Evaluasi Pelayanan Komunikasi Publik Aplikasi Laporan tanggal 24 Agustus 2020 di Graha BNPB
- 10) Rapat Strategi Penyampaian Komunikasi Publik dalam Edukasi Adaptasi Kebiasaan Baru di masa Pandemi COVID-19 tanggal 12 Agustus 2020 di Graha BNPB

III.4 Kegiatan PPID BNPB dalam Pelayanan Permohonan Informasi

Pelayanan informasi yang diberikan seputar perkembangan kejadian bencana, edukasi dalam penanggulangan bencana dan informasi Covid-19. Dalam memberikan pelayanan PPID BNPB dilakukan dengan:

a. Pemohon Informasi datang langsung

Selama tahun 2020 BNPB hanya memperoleh 1 permohonan informasi datang langsung ke kantor BNPB, a.n Yenny perihal informasi penanganan banjir di Jabodetabek. Terkait pertanyaan tersebut BNPB telah menjawabnya. Dalam memberikan pelayanan petugas PPID menghubungi pemohon informasi dan memberikan jawaban secara tepat.

a. Melalui email PPID

Rekapitulasi PPID dari Bulan Januari s/d Oktober 2020

Bulan	Jumlah	Keterangan
Januari	5	sudah dijawab
Februari	7	sudah dijawab
Maret	5	sudah dijawab
April	3	sudah dijawab
Mei	13	sudah dijawab
Juni	-	
Juli	-	
Agustus	-	
September	-	
Oktober	-	
November	-	
Desember	-	
Total	33	

Sejak BNPB terintegrasi dengan aplikasi lapor tidak adanya pemohon informasi melalui PPID sejak bulan Juni hingga Desember tahun 2020. Mayoritas pemohon informasi mengajukan informasi melalui aplikasi Lapor.

III.5 Kegiatan PPID dalam melayani Aplikasi lapor

Selain melayani permohonan informasi melalui email PPID dan website BNPB. Tim PPID BNPB juga bertugas melayani pelaporan dari aplikasi lapor. Dalam melayani pelaporan terkait Covid-19 dalam aplikasi lapor petugas PPID berdasarkan surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia tentang Mekanisme khusus dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-Lapor dalam rangka mendukung penanganan dampak Covid-19 di lingkungan pemerintah.

Lampiran Rekapitulasi Layanan Aplikasi Laport Periode Januari s/d Desember 2020

Tracking ID	Tanggal Laporan Masuk	Nama Pelapor	Kategori Disposisi
5221357	23 Jan 2020	Darwis Amran	Kepegawaian
5265438	19 Mar 2020	Weny Felisia	Situasi Khusus
5267027	22 Mar 2020		Kesehatan
5267969	23 Mar 2020	628236693xxxx	Kesehatan
5268017	23 Mar 2020	La Iti	Kesehatan
5268464	23 Mar 2020	628521007XXXX	Corona - Pemeriksaan Masal (Rapid Test)
5268479	23 Mar 2020	628213444xxxx	Corona - Pemeriksaan Masal (Rapid Test)
5269180	24 Mar 2020	Angelica	Perekonomian
5273061	28 Mar 2020	Jay Adiputra	Penanggulangan Bencana
5273129	28 Mar 2020	Wawan Adi Purnomo	Corona - Pemeriksaan Masal (Rapid Test)
5273452	28 Mar 2020	Muhammad Sabri	Corona - Sarana Rumah Sakit Tidak Mencukupi
5273592	28 Mar 2020	Bu	Corona - Kekurangan Kebutuhan Logistik dan APD
5275788	30 Mar 2020	Alex	Corona - Karantina Wilayah
5277584	1 Apr 2020	Jjai	Corona Virus
5279060	3 Apr 2020	Adya Ersyad	Corona Virus
5280643	4 Apr 2020	Ali Syahbana	Corona - Karantina Wilayah
5284506	7 Apr 2020	Rangga Indra Permana	Corona - Bantuan untuk Masyarakat
5284589	7 Apr 2020	628134892xxxx	Corona Virus
5288477	11 Apr 2020	Rachmad Alimudin	Corona - Dampak Ekonomi
5292055	14 Apr 2020	Bu Rt	Corona Virus
5292549	14 Apr 2020	Sandi	Corona - Dampak Ekonomi
5293589	15 Apr 2020	Ruth Noviana	Corona - Bantuan untuk Masyarakat
5298761	19 Apr 2020	Yudha Setiawan	Corona - Bantuan untuk Masyarakat
5301797	21 Apr 2020	Novia	Corona - Bantuan untuk Masyarakat
5301910	22 Apr 2020	Akhmad Baihaqi	Corona - Karantina Wilayah
5304336	23 Apr 2020	Hairudin	Corona - Karantina Wilayah
5316238	4 May 2020	Lucyiwati N	Corona - Bantuan untuk Masyarakat
5317531	5 May 2020	Mohamad Afiefudin	Corona - Karantina Wilayah
5317819	5 May 2020	Tuwandi	Corona - Bantuan untuk Masyarakat
5321608	9 May 2020	Ook Sasmitaloka	Corona - Jaga Jarak Aman (Physical Distancing)
5325434	13 May 2020	628219811xxxx	Corona - Dampak Ekonomi
5329387	17 May 2020	Rajuli	Penanggulangan Bencana
5332193	19 May 2020	Nuha Azkayra Zalfa	Corona - Bantuan untuk Masyarakat
5332965	20 May 2020	Lia Putranti	Pengaduan Call Center 117 COVID-19
5339741	27 May 2020	Chris	Informasi Media Elektronik COVID-19
5342680	31 May 2020	Vicky Zaynul Firmansyah	Informasi Media COVID-19 Lainnya
5349888	10 Jun 2020	Anang Saputra	Informasi Media Elektronik COVID-19
5353223	14 Jun 2020	Zaki Mubarak	Korupsi
5354875	16 Jun 2020	Vira Alfita	Sosialisasi dan Edukasi
5359314	23 Jun 2020	Candra	Penanggulangan Bencana
5373540	14 Jul 2020	Afroad	Sosialisasi
5373986	15 Jul 2020	Afroad	Informasi Media COVID-19 Lainnya
5380017	25 Jul 2020	Ahmad Daffa Atha H	Lainnya seputar Corona Virus
5380681	27 Jul 2020	Dendy Darmawan	Lainnya seputar Corona Virus
5380818	27 Jul 2020	Ahmad Daffa Atha H	Lainnya seputar Corona Virus
5385030	4 Aug 2020	Sondy Pradana	Pengaduan Website COVID-19
5385838	5 Aug 2020	Ahmad Daffa Atha H	Pelayanan Pemerintahan
5396032	20 Aug 2020	628534831xxxx	Topik Lainnya
5403519	30 Aug 2020	628128246xxxx	Kepegawaian
5417971	13 Sep 2020	Pujasera	Lainnya terkait Ketenteraman, Ketertiban Umum,
5417977	13 Sep 2020	Pujasera	Lainnya terkait Ketenteraman, Ketertiban Umum,
5423694	19 Sep 2020	Rizki Satya Pratama	Pelayanan Kesehatan lain akibat COVID-19
5439675	4 Oct 2020	Umam	Informasi Media COVID-19 Lainnya
5473883	10 Nov 2020	Jacko Ryan	Lainnya terkait Pendidikan Tinggi
5508373	18 Dec 2020	Sunaryo Winardi	Penanggulangan Bencana

IV. Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Memasuki sepuluh tahun sejak pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik masih banyak Badan Publik (BP) yang belum patuh melaksanakannya. Belum maksimalnya kepatuhan BP terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang sudah wajib dilaksanakan sejak 2010 itu, tampak jelas terlihat dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan BP yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat tahun 2020. Ketua KI Pusat Gede Narayana menyampaikan hal tersebut saat menyampaikan laporan tentang pelaksanaan monev keterbukaan BP di depan Wakil Presiden Prof Dr (HC) KH Ma'ruf Amin saat menyampaikan anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari rumah dinas Wapres RI, Rabu (25/11/2020).

Gede memaparkan hasil monev keterbukaan BP, bahwa dari 348 BP yang dimonitoring sepanjang tahun 2020, mayoritas 72,99 persen (254 BP) masih sangat rendah kepatuhan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, yaitu 17,53 persen (61 BP) hanya masuk kategori Cukup Informatif, 13,51 persen (47 BP) Kurang Informatif dan 41,95 persen (146 BP) Tidak Informatif.

Dijelaskannya, berdasarkan rentangan penilaian monitoring dan evaluasi BP tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KI Pusat melibatkan delapan juri dari kalangan akademisi, peneliti, pegiat keterbukaan informasi dan media massa, untuk kategori BP Informatif hanya 17,43 persen (60 BP) dan Menuju Informatif 9,77 persen (34 BP) yang dapat dinilai telah melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Disampaikannya nilai setiap kategori, yaitu Informatif bernilai 90-100, Menuju Informatif 80-89,9, sedangkan Cukup Informatif hanya bernilai 60-79,9 (termasuk rendah keterbukaan informasinya), Kurang Informatif (40-59,9), dan Tidak Informatif (0-39,9), ternyata masih ada BP bernilai dibawah 10 bahkan 0. "Besarnya prosentase BP yang masih masuk kategori Cukup Informatif, Kurang Informatif bahkan Tidak Informatif masih memprihatinkan, maka harus digarisbawahi bahwa Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia masih jauh dari tujuan yang diamanatkan oleh UU KIP," tegas Gede menjelaskan.

Menurutnya, kondisi yang memprihatinkan ini harus menjadi tugas bersama antara Pemerintah, BP dan Komisi Informasi.

la menyampaikan bahwa masih diperlukan dorongan yang lebih besar untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

“Komisi Informasi akan lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi publik melalui komitmen dan dukungan yang kuat dari pemerintah,” ungkapnya lagi. Menurutnya meski masih ada BP yang Tidak Informatif namun tidak sedikit BP yang telah berupaya meningkatkan pelayanan keterbukaan Informasi Publiknya. “Seperti peningkatkan secara signifikan jumlah badan publik kategori Informatif tahun ini, jika pada tahun lalu hanya 34 yang Informatif maka sekarang meningkat tajam menjadi 60 badan publik Informatif, sehingga upaya badan publik untuk berbenah diri secara sungguh-sungguh, patut diberikan apresiasi yang tinggi,” katanya.

Ia juga menyatakan prihatin, karena ada beberapa BP yang tahun 2019 masuk kategori Informatif justru tahun ini merosot ke kategori Menuju Informatif. Untuk itu, menurutnya pimpinan BP dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) tidak boleh terpaku pada penganugerahan kategori Informatif yang telah diraih namun perlu kerja keras agar setiap tahun ditetapkan sebagai BP Informatif.

Meski demikian, ia juga menyampaikan, bahwa hasil penganugerahan ini bukanlah suatu ajang yang dimaknai sebagai kontestasi antar BP, tetapi harus dimaknai sebagai tolak ukur implementasi keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Ia juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan BP yang telah berpartisipasi dan berkomitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik, dari 348 BP sebanyak 324 BP mengisi SAQ lewat aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id, artinya tingkat partisipasi BP mencapai 93,1 persen melesat jauh dari 74,37 persen partisipasi BP tahun 2019.

Menurutnya, pelaksanaan monev untuk mengukur kepatuhan BP oleh KI Pusat 2020 ini penuh dinamika di tengah pandemic Covid-19. Untuk itu, ia menyatakan seluruh tahapan monev mulai dari sosialisasi, penyampaian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) untuk diisi BP, verifikasi SAQ hingga tahap presentasi sampai puncak penganugerahan dilaksanakan secara protocol kesehatan.

Dalam pelaksanaan presentasi BP, menurutnya semua dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) melalui zoom meeting. Adapun tim pakar sebagai juri presentasi, semua Komisioner KI Pusat bersama Prof. Dr. Siti Zuhro (Peneliti LIPI), Abdul Manan (Ketua AJI), Yohan Wahyu (Litbang Kompas), Dr Totok Pranoto

(Akademisi UI), Dr Amirudin (Akademisi Undip), dan Muhammad Yasin SH MH (Redaktur Hukum Online).

Dalam Monev KIP, PPID BNPB memperoleh kategori cukup informatif dengan skor 69,23 sebelumnya memperoleh 64,56 terjadi peningkatan kualitas pelayanan komunikasi publik.



NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1	Dewan Perwakilan Rakyat RI	79.48
2	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)	78.7
3	Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)	77.3
4	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas)	75.74
5	Kepolisian RI (Markas Besar Kepolisian RI)	70.52
6	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	69.23

Gbr 1. skoring BNPB dalam pelayanan publik



Gbr. 2 Penyerahan sertifikat cukup informatif di kantor Komisi Informasi Pusat

IV. Capaian dan Output PPID BNPB

- 1) Mendukung Keterbukaan Informasi dan bersinergi/pendampingan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP), output dari kegiatan tersebut menghasilkan video pelayanan Komunikasi Publik serta terkait regulasi adanya SOP pelayanan informasi fasilitasi sengketa informasi, keberatan informasi, pelayanan permohonan informasi, penanganan pengaduan masyarakat, pendokumentasian informasi dikecualikan, penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik dan pengujian konsekuensi informasi publik.
- 2) Mendukung Reformasi dan Birokrasi dalam keterbukaan informasi dan bersinergi dengan admin aplikasi lapor kemenpan RB dan BNPB dalam pelayanan informasi terkait Covid-19 output yang dihasilkan laporan pelayanan informasi terkait covid-19 di aplikasi lapor (terlampir)
- 3) Pengembangan website PPID BNPB dengan output terwujudnya pelayanan informasi berbasis online dengan website PPID BNPB.

V. Kendala PPID

- 1) Anggaran yang kecil tidak maksimal untuk kegiatan pelaksanaan PPID.
- 2) SK Tim PPID perlu memfasilitasi semua eselon II BNPB karena sebelumnya SK Tim PPID tidak mencakup semua eselon II BNPB.
- 3) Koordinasi terhadap permintaan informasi kepada unit-unit BNPB masih sulit dilakukan diperlukan mekanisme/platform yang efektif agar menghubungkan antar unit BNPB.
- 4) Tingkat kehadiran anggota PPID masih rendah dalam undangan rapat baik secara online/zoom dan bertemu langsung, sehingga pemahasan rapat-rapat PPID tidak maksimal dalam memperoleh masukan/kontribusi dari unit BNPB masih sedikit.
- 5) Konten Website PPID dari unit BNPB lainnya masih minim, mayoritas konten PPID berasal dari Pusdatinkom. Hal ini seolah-olah PPID milik Pusdatinkom bukan milik BNPB.
- 6) Standar Pelayanan Komunikasi publik bagi anggota pelaksana belum ada sehingga perlunya pelatihan dan pembinaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan PPID.
- 7) Belum ada ruang khusus PPID dalam pengarsipan dokumen, di dukung perangkat komputer, printer, internet dan ruang pelayanan PPID.

- 8) Belum adanya penugasan petugas khusus yang memberikan pelayanan secara online dan offline kepada pemohon informasi, mendata informasi dan melakukan update website PPID BNPB dengan meminta langsung data dan informasi kepada kegiatan unit-unit BNPB maupun anggota PPID BNPB.

VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

- 1) Anggaran PPID perlu diperbesar untuk mengotimalkan kinerja PPID melayani permohonan informasi Diorama BNPB, pelayanan pelaporan pada aplikasi lapor dan tugas rutin PPID seperti mendata informasi, pemberian informasi secara serta merta, berkala maupun merumuskan kebijakan informasi seperti informasi dikecualikan/ dirahasiakan dan mengisi content-content dari semua unit kegiatan BNPB di website PPID.
- 2) Adanya *punishment and reward* untuk unit BNPB, anggota pelaksana dan pimpinannya agar dalam koordinasi dan mendukung kegiatan PPID BNPB secara lebih efektif terutama kehadiran dan kerjasama dalam koordinasi saat rapat.
- 3) Adanya ruangan khusus dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, dilengkapi peralatan komputer, printer, internet dan penempatan arsip dokumen penting PPID.
- 4) Layanan PPID wajib didukung oleh SDM yang mampu dan terampil dalam memberikan layanan serta menguasai informasi yang dimiliki. Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM melalui pelatihan maupun diklat terkait layanan publik khususnya layanan informasi.
- 5) Penugasan khusus petugas PPID dalam layanan secara online melalui website PPID BNPB, maupun melalui media sosial BNPB seperti Facebook, Twitter, Instagram dan pengarsipan dokumen PPID. Bila hanya mengandalkan pekerjaan tersebut pada satu orang maupun pekerjaan tambahan/sambilan tidak akan efektif.
- 6) Beberapa indikator pada *good governance* yaitu keterbukaan informasi publik yang baik dan pelayanan komunikasi publik yang efektif. Maka koordinasi dan kerjasama dengan Komisi Informasi Pusat dan Kemenpan RB dalam mendukung reformasi birokrasi dalam pelayanan komunikasi publik perlu terus ditingkatkan, disini perlunya dukungan semua pimpinan BNPB tidak hanya dari Pusdatinkom.

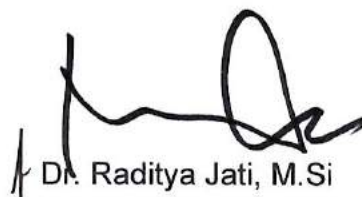
VIII. Penutup

Demikian, laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengambilan kebijakan ke depannya dalam mengembangkan PPID BNPB yang lebih baik.

Jakarta, 7 Januari 2021

Menyetujui

Kepala Pusat Data, Informasi dan,
Komunikasi Kebencanaan



Dr. Raditya Jati, M.Si

I. Lampiran Foto kegiatan PPID



II. Lampiran undangan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik dari Komisi Informasi Pusat



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 29 Juni 2020

Nomor : 287 /KIP-VI/2020
Lampiran : 1 (satu Bundel)
Perihal : Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020

Kepada Yth
Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Negara / Lembaga Pemerintah Non Kementerian
c.q. Atasan PPIID
(Daftar Terlampir)

di
Tempat

Dengan hormat,

Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 dilakukan guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki SLIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 akan dilaksanakan kepada 350 Badan Publik yang terdiri atas 7 (tujuh) kategori, yaitu Kementerian, Pemerintah Provinsi, Lembaga Negara, dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi Informasi Pusat akan melakukan kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 kepada seluruh PPIID Badan Publik yang akan dilaksanakan pada

Hari/tanggal : Senin, 13 Juli 2020
Waktu : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Virtual Zoom Meeting (akses akan diberikan kemudian)
Agenda : Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020

Oleh karena itu, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan menugaskan 2 (dua) orang perwakilan untuk mengikuti acara tersebut. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Reno Bima Yudha (0857-7402-5929). Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KOMISI INFORMASI PUSAT
KETUA


GEDE NARAYANA

Lampiran Surat
Nomor : 287 KIP/VI/2020
Tanggal : 29 Juni 2020

Daftar Lembaga Negara / Lembaga Pemerintah Non Kementerian

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2. Dewan Perwakilan Rakyat RI
3. Dewan Perwakilan Daerah RI
4. Mahkamah Agung RI
5. Mahkamah Konstitusi RI
6. Kejaksaan Agung
7. Tentara Nasional Indonesia
8. Kepolisian RI
9. Komisi Yudisial
10. Badan Pemeriksa Keuangan RI
11. Bank Indonesia
12. Otoritas Jasa Keuangan
13. Sekretariat Kabinet
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
16. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
17. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
18. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
19. Badan Informasi Geospasial (BIG)
20. Badan Intelijen Negara (BIN)
21. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla)
22. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
23. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
24. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
25. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
26. Badan Narkotika Nasional (BNN)
27. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
28. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
29. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
30. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
31. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
32. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
33. Badan Pengkajian dan Penerapan Badan Pengawas Teknologi (BPPT)

III. Permohonan Pengisian Aplikasi E-Money



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIC INDONESIA

Jakarta, 15 Juli 2020

Nomor : 314 /KIP/VII/2020
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Permohonan Pengisian Aplikasi e-Money

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Negara / Lembaga Pemerintah Non Kementerian
c.q. Atasan PPID
(Daftar Terlampir)

di
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti pelaksanaan sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat pada tanggal 13 – 15 Juli 2020 secara virtual, bersama ini kami sampaikan bahwa tahapan pengisian kuesioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi yang dapat diisi melalui aplikasi <https://e-money.komisiinformasi.go.id/> dimulai tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020. Untuk itu kami meminta Bapak/Ibu atasan PPID untuk dapat menugaskan PPID melakukan pengisian kuesioner sesuai ketentuan yang telah disampaikan pada saat sosialisasi berlangsung.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang setiap tahun diselenggarakan akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari laporan yang akan disampaikan Komisi Informasi Pusat kepada Presiden RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI. Oleh karena itu, kami mengharapkan partisipasi aktif Badan Publik dalam setiap tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 (terlampir dalam Petunjuk Umum)

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KOMISI INFORMASI PUSAT
KETUA

GEĐE NARAYANA

Lampiran Surat
Nomor 310 /KIP/VII/2020
Tanggal : 15 Juli 2020

Daftar Lembaga Negara / Lembaga Pemerintah Non Kementerian

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2. Dewan Perwakilan Rakyat RI
3. Dewan Perwakilan Daerah RI
4. Mahkamah Agung RI
5. Mahkamah Konstitusi RI
6. Kejaksaan Agung
7. Tentara Nasional Indonesia
8. Kepolisian RI
9. Komisi Yudisial
10. Badan Pemeriksa Keuangan RI
11. Bank Indonesia
12. Otoritas Jasa Keuangan
13. Sekretariat Kabinet
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
16. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
17. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
18. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
19. Badan Informasi Geospasial (BIG)
20. Badan Intelijen Negara (BIN)
21. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla)
22. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
23. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
24. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
25. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
26. Badan Narkotika Nasional (BNN)
27. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
28. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
29. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
30. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
31. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
32. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
33. Badan Pengkajian dan Penerapan Badan Pengawas Teknologi (BPPT)

IV. Membuat Video Presentasi Pelayanan Komunikasi Publik BNPB



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 September 2020

Nomor : 494/KIP/IX/2020
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Perpanjangan Penyampaian Video Presentasi Monitoring dan Evaluasi KIP Tahun 2020

Kepada Yth
Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Negara / Lembaga Pemerintah Non Kementerian
c.q. Atasan PPID
(Daftar Terlampir)

di
Tempat

Dengan hormat,

Memperhatikan surat sebelumnya dari Komisi Informasi Pusat Nomor 378/KIP/VIII/2020 Perihal Pemberitahuan Tata Cara Penyampaian Video Presentasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020, yang pada pokoknya menginformasikan batas waktu penyampaian video presentasi pada tanggal 16 September 2020. Setelah mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa hal, maka Komisi Informasi Pusat **memberikan perpanjangan waktu penyampaian video presentasi paling lambat tanggal 30 September 2020**. Ketentuan pembuatan dan penyampaian video berpedoman pada surat sebelumnya.

Pemberitahuan ini hanya disampaikan kepada Badan Publik yang telah mengisi *self assessment questionnaire* pada Aplikasi Monev Komisi Informasi. Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, terimakasih.

KOMISI INFORMASI PUSAT
KETUA

GEDE NARAYANA

Daftar Lembaga Negara / Lembaga Pemerintah Non Kementerian

- 1 Lembaga Ketahanan Nasional (Lembhannas)
- 2 Lembaga penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
- 3 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
- 4 Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
- 5 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- 6 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
- 7 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
- 8 Mahkamah Konstitusi RI
- 9 Lembaga Penjaminan Simpanan
- 10 Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- 11 Lembaga Administrasi Negara (LAN)
- 12 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas)
- 13 Dewan Perwakilan Daerah RI
- 14 Badan Pusat Statistik (BPS)
- 15 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- 16 Dewan Perwakilan Rakyat RI
- 17 Badan Pemeriksa Keuangan RI
- 18 Bank Indonesia
- 19 Mahkamah Agung RI
- 20 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- 21 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- 22 Badan SAR Nasional (Basarnas)
- 23 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- 24 Kepolisian RI (Markas Besar Kepolisian RI)
- 25 Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- 26 Otoritas Jasa Keuangan
- 27 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
- 28 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
- 29 Sekretariat Kabinet
- 30 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- 31 Badan Standardisasi Nasional (BSN)
- 32 Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan)

V. Pendampingan Penilaian Dewan Juri KIP dalam Presentasi Video



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 Agustus 2020

Nomor : 200/KIP.VIII/2020
Lampiran : 1 (satu) Bundel
Perihal : **Pemberitahuan Tata Cara Penyampaian Video Presentasi
Monitoring dan Evaluasi KIP Tahun 2020**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Negara / Lembaga Pemerintah Non Kementerian
c.q. Atasan PPID
(Daftar Terlampir)

di
Tempat

Dengan hormat,

Memindaklanjuti rangkaian tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik (Money KIP Tahun 2020) kami informasikan bahwa setelah tahapan pengisian *self assessment questionnaire* akan dilanjutkan **tahap presentasi** yang dilakukan secara virtual. Oleh sebab itu Badan Publik diharapkan mengirimkan video presentasi yang memuat Inovasi dan Kolaborasi Keterbukaan Informasi Publik (ketentuan muatan materi dan durasi video dapat dilihat pada Petunjuk Umum Money KIP Tahun 2020, sebagaimana terlampir dalam surat ini) paling lambat tanggal **16 September 2020**. Video dikirimkan melalui <https://bit.ly/LN-LPNk-vidMoneyKIP>

Pengiriman Video tersebut diwajibkan bagi Badan Publik yang sudah mengisi dan mengirimkan *self assessment questionnaire* pada laman <https://e-money.komisinformasi.go.id>. Untuk jadwal pelaksanaan presentasi akan kami sampaikan dikemudian hari dan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi (Reno Bina Yudha 0857-7402-5929). Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KOMISI INFORMASI PUSAT
KETUA

GEDE NARAYANA

VI. Pendampingan dalam Silaturahmi Nasional Badan Publik & Komisi Informasi se-Indonesia



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIC INDONESIA

Jakarta, 28 September 2020

Nomor : 530/KIP/IX/2020

Lampiran : -

Perihal : Surat Undangan Silaturahmi Nasional Badan Publik & Rapat Koordinasi Nasional ke-11 Komisi Informasi se-Indonesia 2020 secara daring yang akan dibuka oleh Bapak Presiden RI

Kepada Yth.

Daftar Peserta (terlampir)

di Tempat.

Dengan hormat,

Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dengan fungsi dan tugasnya menjalankan dan mengawal pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Menyikapi permasalahan global yakni pandemi Covid-19 KI Pusat perlu membangun sinergi dan integrasi keterbukaan informasi publik pada kesehatan dan ekonomi nasional. Proyeksinya, KI Pusat ingin mengajak berbagai komponen bangsa, terutama badan publik dari pusat hingga daerah dan masyarakat untuk terus melakukan inovasi terhadap pelayanan informasi publik. Tujuannya agar pandemi ini tidak menjadi hambatan bagi ruang *Access to Information* sebagai *Right to Information* pada semua lapisan masyarakat dan menjadi *warning system* bagi Badan Publik untuk tetap melaksanakan *Obligation to Tell* kepada masyarakat secara aktif maupun pasif.

Selubungan dengan hal tersebut, KI Pusat akan melaksanakan Acara Silaturahmi Nasional Badan Publik & Rapat Koordinasi Nasional ke-11 Komisi Informasi se-Indonesia 2020 secara daring. Dengan tema "**Inovasi Pelayanan Informasi Publik untuk Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi Nasional melalui Adaptasi Kebiasaan Baru**" yang akan dihadiri oleh 1000 Badan Publik yang terdiri dari seluruh Badan Publik tingkat pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan Komisi Informasi se-Indonesia. Adapun kegiatan dimaksud akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin-Rabu, 26-28 Oktober 2020 (susunan acara terlampir pada TOR)
Tempat : forum daring (akses akan diberikan kemudian melalui LO)
Agenda : Silaturahmi Nasional Badan Publik & Rapat Koordinasi Nasional ke-11 Komisi Informasi se-Indonesia 2020

Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Narahubung pada masing-masing LO dalam *Term of Reference* (TOR).



Tembusan:
Sekretaris KIP

Lampiran Surat 1

Nomor : 530/KIP/IX/2020

Tanggal : 28 September 2020

Kepada Yth. Lembaga Negara / Lembaga Pemerintah Non Kementerian:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2. Dewan Perwakilan Rakyat RI
3. Dewan Perwakilan Daerah RI
4. Mahkamah Agung RI
5. Mahkamah Konstitusi RI
6. Kejaksaan Agung
7. Tentara Nasional Indonesia
8. Kepolisian RI
9. Komisi Yudisial
10. Badan Pemeriksa Keuangan RI
11. Bank Indonesia
12. Otoritas Jasa Keuangan
13. Sekretariat Kabinet
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
16. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
17. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
18. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
19. Badan Informasi Geospasial (BIG)
20. Badan Intelijen Negara (BIN)
21. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla)
22. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
23. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
24. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
25. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
26. Badan Narkotika Nasional (BNN)
27. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
28. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
29. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
30. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
31. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
32. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
33. Badan Pengkajian dan Penerapan Badan Pengawas Teknologi (BPPT)
34. Badan Pusat Statistik (BPS)
35. Badan SAR Nasional (BASARNAS)
36. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
37. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
38. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
39. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
40. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
41. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
42. Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS)
43. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
44. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS)
45. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)